

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendidikan Non Formal

2.1.1.1 Dasar Hukum Pendidikan Non Formal

Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam kebutuhan dasar hidup untuk setiap manusia, melalui pendidikan upaya meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah sudah dikenal di Indonesia dari sebelum masa kemerdekaan, dapat dikatakan bahwa Pendidikan luar sekolah telah hidup dan berada dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum adanya sistem persekolahan. Tetapi pengakuan yuridis baru didapatkan pada tahun 1989 yaitu setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan luar sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 73/1991 bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu pendididkannya, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Supaya tujuan tersebut tercapai dibutuhkan program-program pendidikan luar sekolah yang dapat menunjang hal tersebut. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara langsung dan menyesuaikan dengan masyarakat tanpa menentukan adanya batas umur. Selain itu terdapat juga sruktur dan jenjang yang bisa diikuti dalam pelaksanaan pembelajaran. Pendidikan Non Formal berfungsi meningkatkan potensi warga belajar dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (dalam UU SISDIKNAS tahun 2003 pasal 26 ayat 2).

Landasan hukum pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal menurut Indrawan dan Wijoyo (2020 hlm. 5) yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.

2.1.1.2 Pengertian Pendidikan Non Formal

Menurut Saleh (2020 hlm. 8-9) Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang disusun dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada warga belajar agar mempunyai keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal (persekolahan). Pendidikan luar sekolah merupakan bentuk dari perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara luas, dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya berupa kegiatan terorganisir yang ada disekolah, karena pada hakikatnya pendidikan yang sebenarnya berasal dari kehidupan. Sekolah merupakan sebagian kecil sistem yang dibatasi oleh jenjang umur dan disiplin. Konsep pendidikan luar sekolah berasal dari dasar hasil pengamatan dan pengalaman langsung serta pengalaman tidak langsung yang disempurnakan, sehingga hasilnya dapat mengungkapkan persamaan serta perbedaan dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari pengertian, sistem, prinsip-prinsip dan paradigma yang dimiliki keduanya.

Menurut Phillips H. Combs dalam Saleh (2020 hlm. 10) pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah merupakan setiap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik mandiri maupun kegiatan dari suatu instansi atau lembaga, yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada peserta didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan belajar. Menurut Sudjana (2004:146-147) satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok

belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim dan satuan pendidikan lainnya yang sejenis. Lembaga kursus adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kecakapan hidup. Lembaga pelatihan adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat serta berfokus pada keterampilan tertentu untuk memasuki dunia kerja di masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat ialah tempat pembelajaran masyarakat yang didalamnya terdapat kegiatan untuk meningkatkan potensi desa dan atau perkotaan. Satuan pendidikan sejenis meliputi seperti suatu lembaga, panti, pesantren, bimbingan belajar, sanggar, dan masih banyak lagi.

Dari pengertian para ahli dapat diambil kesimpulan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal (sekolah) sebagai pelengkap, pengganti serta penambah bagi pendidikan tanpa adanya batasan usia. Selain itu dalam pendidikan non formal terdapat program-program yang dapat disetarakan dengan pendidikan formal, seperti pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C. Program-program pendidikan non formal tidak hanya dilakukan oleh organisasi pemerintahan dapat juga dilaksanakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka. Pendidikan non formal diharapkan dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, layanan pendidikan tersebut dapat berguna sebagai pengganti, penambah, serta pelengkap dari pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan non formal dapat berfungsi untuk meningkatkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pembedayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.

Berdasarkan perkembangan serta banyaknya kegiatan yang dilaksanakan menurut Joesoef (2008: 54-56) dalam Nanang (2014 hlm. 39-40) PLS atau pendidikan non formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Terdapat berbagai bentuk kegiatan atau program dalam PNF sesuai dengan pendidikan yang diinginkan.

- b) Adanya perbedaan yang terlihat antara pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti fungsi dari pendidikan non formal dapat dijadikan pengganti atau pelengkap dari pendidikan formal.
- c) Pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan non formal dilakukan oleh pamong, masyarakat, pengawas umum serta pengawas pribadi dalam pendidikan non formal.
- d) Adapun beberapa program kegiatan pendidikan non formal yang didalanya ada berbagai peraturan waktu pembelajaran, teknologi serta perlengkapan pembelajaran.
- e) Penyampaian materi pembelajaran beragam dari mulai tatap muka dengan guru dan kelompok-kelompok belajar sampai penggunaan audio televisi, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus-kursus, serta alat-alat bantu visual.
- f) Pendidikan non formal menekankan pada berbagai penyebaran program teori dan praktek secara umum.
- g) Jenjang sistem dalam pendidikan non formal sangat terbatas sesuai dengan kebutuhan, yaitu proses pembentukan kualifikasi profesional yang berlisensi, dan dapat diberikan kepada anggota atau organisasi, dengan menilai latar belakang.
- h) Pendidik atau tutor diajarkan secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya mempunyai kualifikasi profesional.
- i) Pendaftaran penerimaan murid, guru dan pimpinan, serta kesuksesan latihan keterampilan; sesuai dengan pengaruh Pendidikan non formal terhadap peningkatan produksi ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan peserta didik.
- j) Perencanaan kegiatan dalam pendidikan non formal mempunyai pengaruh besar pada produksi ekonomi dan perubahan sosial dalam jangk waktu singkat dari pada pendidikan formal seperti sekolah.
- k) Peran PNF terdiri dari berbagai pengetahuan, keterampilan serta berpengaruh pada nilai-nilai program dalam rangka menuju pembangunan nasional.

Selanjutnya menambahkan ciri-ciri PNF menurut Sulfemi (2018 hlm. 4-5) yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat.
- b. Guru merupakan fasilitator yang ada dalam pendidikan non formal.
- c. Tidak terdapat batasan usia dalam program kegiatan PNF
- d. Kurikulum pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Pelaksanaan durasi penyampaian materi relatif singkat.
- f. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.
- g. Pembelajaran bertujuan membantu peserta dengan keterampilan yang diinginkan untuk persiapan peserta dalam dunia kerja.

Adapun lembaga-lembaga yang ada dalam pendidikan non formal antara lain; Kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), lembaga khusus Sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga ketrampilan dan pelatihan.

2.1.1.3 Tujuan Pendidikan Non Formal

Menurut Rahmat (2018 hlm. 61) dalam bukunya mengungkapkan visi pendidikan non formal yaitu “Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Sepanjang Hayat” dan misi pendidikan non formal yaitu meningkatkan kualitas keterampilan dan kualitas hidup untuk masyarakat yang membutuhkan keterampilan tersebut dalam rangka mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dengan menerapkan prinsip dasar belajar sepanjang hayat. Adapun tujuan dari pendidikan non formal yaitu salah satunya ialah 5 tujuan pembangunan PNF, yaitu:

- a) Memperluas, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan PAUD secara merata, adil, dan bermutu dalam rangka membentuk kesiapan belajar anak untuk menempuh pendidikan lebih lanjut.
- b) Menurunkan angka jumlah penduduk buta aksara melalui gerakan pemberantasan buta aksara dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien.
- c) Mewujudkan pendidikan kesetaraan berbasis keterampilan dan kecakapan hidup secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun dan pendidikan menengah.
- d) Melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan keterampilan, keahlian, kecakapan, untuk

mendorong peserta sebagai tenaga kerja yang berkemampuan atau kemandirian berusaha.

- e) Mmperbaharui kelembagaan pelaksana teknis program PNF baik di pusat maupun di daerah dalam rangka perluasan akses serta pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017 hlm. 3) tujuan dari pendidikan non formal antara lain:

- a) Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal atau putus sekolah (DO) dari pendidikan formal, maka dapat mengikuti pendidikan pengganti melalui jalur pendidikan non formal.
- b) Pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal, apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik selama pendidikan formal di sekolah dirasa belum cukup maka dapat menambahnya melalui pendidikan non formal seperti: bimbingan belajar, les privat.
- c) Pendidikan non formal berfungsi sebagai pelengkap, apabila peserta didik dalam pendidikan formal tertarik untuk menambahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan non formal, contohnya seperti: kursus memasak, bahasa asing, kursus menjahit.

Adapun tujuan belajar dalam pendidikan non formal yaitu untuk kepentingan pendidikan lanjutan individu setelah selesai melaksanakan pendidikan tingkat dasar, pendidikan formal serta pendidikan nilai-nilai hidup. Seperti melakukan pendidikan lanjutan dengan mengikuti pengajian, berbagai keterampilan dan latihan, pendidikan kesenian, dan lain sebagainya. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan tambahan jalur pendidikan non formal dapat menambah kualitas hidup dari individu itu sendiri

2.1.1.4 Ruang Lingkup dan Karakteristik Pendidikan Non Formal

Ruang lingkup pendidikan non formal berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dari berbagai usia, tempat dan kebutuhan. Ruang lingkup pelayanan pendidikan non formal terdapat keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan non

formal, pelayanan tersebut diselenggarakan oleh pendidikan non formal. PNF tidak hanya dilakukan oleh pemerintah/ departemen, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Ruang lingkup pendidikan non formal dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: Pelayanan, Pranata, dan Pelambangan Program. Rahmat (2018 hlm. 9-11) menambahkan berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan relevansi pendidikan, maka program pendidikan non formal lebih berfokus pada kebutuhan pasar, tanpa melupakan aspek akademis. Oleh karena itu program pendidikan non formal mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha. Karakteristik pendidikan nonformal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dari segi tujuan: a) Jangka pendek dan khusus, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang berfungsi bagi kehidupan masa kini dan masa depan. b) Kurang menekankan pentingnya ijazah, hasil belajar, berijazah atau tidak, dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. b) Ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program, dalam bentuk benda yang diproduksi, pendapatan, keterampilan.
- 2) Dari segi waktu: a) Relatif singkat, jarang lebih dari satu tahun, pada umumnya kurang dari setahun, lamanya tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik, persyaratan untuk mengikuti program ialah kebutuhan, minat, dan kesempatan waktu para peserta. b) Menekankan masa sekarang dan masa depan. Memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan yang terasa bagi peserta didik guna meningkatkan kemampuan sosial ekonominya dalam waktu bebas. Menggunakan waktu tidak penuh dan tidak terus menerus, waktu ditetapkan dengan berbagai cara, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja.
- 3) Dari segi isi program: a) Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik, kurikulum bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. b) Mengutamakan aplikasi, kurikulum lebih menekankan keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan lingkungan. c) Persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik, karena program diarahkan untuk

memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan kemampuan potensial peserta didik maka kualifikasi pendidikan formal dan kemampuan baca tulis sering menjadi persyaratan umum.

- 4) Dari segi proses belajar mengajar: a) Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, kegiatan belajar dilakukan di berbagai lingkungan (masyarakat, tempat bekerja) atau disatukan Pendidikan nonformal (sanggar kegiatan belajar) pusat pelatihan dan sebagainya. b) Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat, pada waktu mengikuti program peserta berada dalam dunia kehidupan dan pekerjaannya, lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan kegiatan belajar. c) Struktur program yang fleksibel, program belajar yang bermacam ragam dalam jenis dan urutannya. Pengembangan kegiatan dapat dilakukan sewaktu program sedang berjalan. d) Berpusat pada peserta didik, kegiatan belajar dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan juru didik. Peserta didik menjadi sumber belajar, lebih menitikberatkan kegiatan membelajarkan peserta didik dari pada mengajar. e) Pegghematan sumber-sumber yang tersedia, memanfaatkan tenaga dan sarana yang terdapat di masyarakat dan lingkungan kerja untuk menghemat biaya.
- 5) Dari segi pengendalian program: a) Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, pengendalian tidak terpusat, koordinasi dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, otonomi terdapat pada tingkat program dan daerah dan menekankan pada inisiatif dan partisipasi di tingkat daerah. b) Pendekatan demokratis, hubungan antara pendidik dan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian. Pembinaan program dilakukan secara demoktratis antara pendidikan, peserta didik dan pihak lain yang berpartisipasi.

2.1.1.5 Bentuk Kegiatan dan Program Pendidikan Non Formal

Menurut Anshori (2010: 18-20) dalam Indrawan dan Wijoyo (2020 hlm. 11-12), berbagai bentuk pelaksanaan PNF yang utama antara lain: (a) belajar kelompok; (b) magang; (c) latihan-latihan keterampilan; (d) lain-lain. Berikut ini penjelasan mengenai bentuk PNF tersebut:

- 1) Belajar kelompok

Kelompok merupakan sekumpulan individu sosial yang terdiri lebih dari 1 individu serta mempunyai hubungan berkesinambungan satu sama lain sesuai dengan status dan peranannya. Kelompok bukanlah hanya kumpulan orang-orang, tetapi anggota kelompok mengadakan interaksi dan diskusi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama agar tercapai tujuan tersebut. Kegiatan belajar kelompok diharapkan dengan terjalannya interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar secara efektif dan efisien.

2) Magang Menurut

Magang adalah suatu proses belajar seseorang yang mendapatkan serta menguasai keterampilan dan senantiasa melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam bidangnya.

3) Latihan keterampilan

Latihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental, keuletan, disiplin dan lain sebagainya agar dapat dipraktikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Latihan keterampilan tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara sistematis yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu.

Adapun jenis program dalam pendidikan non formal dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 26 ayat (4), tercantum bahwa satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Dalam setiap proses kegiatan program yang berlangsung secara sistematis serta berusaha untuk mencapai tujuan tertentu selalu memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi. Yang dimaksudkan dengan komponen adalah unsur-unsur yang terdapat dalam proses itu sendiri, dan masing-masing unsur itu memiliki hubungan fungsional antara unsur yang satu dengan yang lainnya.

1) Masukan sarana (*Instrumental Input*) meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok dapat melaksanakan belajar. Ke dalam masukan ini termasuk tujuan program, tujuan kurikulum,

- pendidik (tutor, pelatih, fasilitator) tentang kependidikan lainnya, tenaga pengelola program, sumber belajar, media fasilitas, biaya, pengelola program.
- 2) Masuk mentah (*Raw Input*) yaitu peserta didik (warga belajar) dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya, termasuk ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor internal, yang meliputi struktur kognitif, pengalaman, sikap, minat, keterampilan, kebutuhan belajar, aspirasi dan lain sebagainya serta ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor eksternal, seperti keadaan keluarga dalam segi ekonomi, status sosial, pendidikan, biaya dan sarana, serta cara dan kebiasaan belajar.
 - 3) Masukan lingkungan (*Enviromental input*) yaitu faktor lingkungan yang menunjang atau mendorong berjalannya belajar pendidikan, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, seperti teman bergaul atau teman kerja, lapangan kerja, kelompok sosial dan sebagainya, serta lingkungan lainnya (iklim, lokasi, tempat tinggal) Proses, menyangkut interaksi antara masukan, sarana, terutama masukan pendidik dengan masukan mentah, yaitu peserta didik (warga belajar) .proses terdiri atas kegiatan belajar membelajarkan, bimbingan dan penyuluhan serta evaluasi.
 - 4) Keluaran (*output*), yaitu kualitas lulusan yang disertai kualitas perubahan tingkah laku yang didapat melalui kegiatan belajar membelajarkan. Perubahan tingkah laku ini mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka perlukan.
 - 5) Masukan lain (*other input*) adalah dorongan lain yang memungkinkan para peserta didik dan lulusannya dapat memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki untuk kemajuan hidupnya. Masukan ini meliputi dana dan modal, lapangan kerja, paguyuban peserta didik (warga belajar) latihan lanjutan, bantuan eksternal, dan sebagainya.
 - 6) Pengaruh (*Infac*), merupakan hasil yang diperoleh peserta didik dan lulusan. Pengaruh tersebut meliputi: (a) Perubahan kualitas hidup yang diawali dengan mendapatkan perolehan pekerjaan atau berwira usaha, perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan dan penampilan diri, (b) kegiatan mendewasakan orang lain atau mengikut sertakan orang lain dalam

memanfaatkan hasil belajar yang telah dimiliki; dan (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembanguana, baik partisipasi pemikiran, tenaga, harta benda dan dana.

Yulianingsih (2013) mengungkapkan komponen-komponen dalam program pendidikan non formal yaitu 10 patokan pendidikan masyarakat:

- a) Warga Belajar merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan belajar, jelas kemampuannya dan tergerak hatinya untuk belajar.
- b) Tutor/sumber belajar merupakan masyarakat yang memiliki ilmu dan kemampuan serta *skill* yang bersedia dipelajari dan digurui oleh siapa saja yang memerlukannya.
- c) Pamong Belajar/penyelenggara Pamong belajar adalah sekelompok yang menjamin terselenggaranya proses belajar dengan tertib, tutur dan terarah. Pamong juga dikatakan sebagai pengurus dan penyelenggara proses belajar, mengatur pendayagunaan sumber belajar yang sudah ada dan sudah siap, mengatur program pemagangan, mengusahakan agar setiap sumber belajar tersedia dan suka rela menyumbang pengetahuan kepada masyarakat.
- d) Sarana Belajar merupakan perlengkapan wajib yang diperlukan agar ragi belajar dapat berproses.
- e) Tempat belajar adalah tempat yang memenuhi syarat untuk tempat pembelajaran atau menampung kegiatan belajar warga masyarakat atau warga belajar.
- f) Sumber Dana adalah barang, uang, dan jasa yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan atau menjalankan kegiatan belajar yang bermanfaat bagi warga dan masyarakat sekitar.
- g) Ragi belajar merupakan suatu rangsangan yang dapat menjadi acuan dalam proses belajar untuk mendapatkan berbagai hasil pembelajaran termasuk menghasilkan ragi baru yang dapat menjadi bahan proses belajar lebih lanjut.
- h) Kelompok belajar adalah para warga belajar yang berkumpul dalam kelompok karena memiliki semangat belajar, keinginan belajar, dan kemauan belajar yang sama.

- i) Program belajar, program kegiatan belajar adalah serangkaian usaha atau kegiatan belajar yang sudah direncanakan bersama dalam musyawarah warga belajar.
- j) Hasil belajar adalah wujud nyata dari setiap kegiatan kelompok belajar yang dihindari dan dinikmati bersama oleh warga belajar dan warga masyarakat.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Pendidikan Non Formal

- a. Pendidikan Kecakapan Hidup
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Pendidikan Kepemudaan
- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
- e. Pendidikan Keaksaraan
- f. Pendidikan Kesetaraan
- g. Pendidikan Kursus
- h. Pendidikan Keluarga
- i. Taman Baca Masyarakat (TBM)

2.1.2 Implementasi

Implementasi menurut KBBI V adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyadi (2015 hlm. 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dengan harapan tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dapat membantu melakukan perubahan besar ataupun kecil yang dapat membantu mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Adapun deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986 hlm. 21-48) dalam Akib (2010). Menurut Quade (1984 hlm. 310) dalam Akib (2010), mengungkapkan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi dari implementasi

kebijakan. Quade juga menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal dapat terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.

Widodo (dalam Syahida, 2014 hlm.10) mengatakan implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Adapun menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno, 2012 hlm. 149-150) menjelaskan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna yaitu pelaksanaan undang-undang dimana berbagai lembaga, organisasi, prosedur dan teknik, bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Syukur dalam Surmayadi (2005 hlm. 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat di kaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tatacara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan atau program dapat dianggap berhasil ketika telah dilakukan konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Menurut David C. Korten yang di wawancarai oleh At Kisson (1991) dalam Akib (2010) meneguhkan kembali gagasannya tentang Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran atau pengguna. Menurut Agustino (2008) mengatakan ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:

- 1) Kualitas kebijakan atau program itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan atau program (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya).
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- 6) Kondisi lingkungan geografi, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Pada kesempatan lain menurut Korten (1980) dalam Akib (2010) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut suatu program atau kebijakan implementasi merupakan tahap penting yang harus di laksanakan sesuai dengan tujuan program tersebut agar keberhasilan suatu program dapat dijalankan sesuai rencana.

2.1.3 Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta)

Program Sekoper Cinta merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan non formal yang ditujukan untuk para perempuan di Provinsi Jawa Barat. Sekoper Cinta merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan leadership dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusif (Gerfianti S, 2019a).

2.1.4.1 Pengertian program Sekoper Cinta

Program Sekoper Cinta termasuk salah satu program yang ada dalam lingkup Pendidikan Masyarakat atau pendidikan nonformal. Program Sekoper Cinta ini merupakan salah satu program tahunan dari Provinsi Jawa barat yang dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Program ini dilandasi dengan banyaknya permasalahan sosial yang dirasakan oleh perempuan, dari kurangnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan perempuan sendiri yang menyebabkan ketidakberdayaan perempuan dalam melaksanakan kehidupannya. Dengan demikian program Sekoper Cinta ini semoga dapat membantu mengatasi permasalahan sosial yang dipicu oleh kerentanan keluarga, seperti ketidaksetaraan gender, tingginya kasus kekerasan pada keluarga dan perempuan, tindak pidana perdagangan orang, meningkatnya angka perceraian, *stunting*, perkawinan anak usia dini dan masalah ekonomi. Program Sekoper Cinta merupakan tempat para perempuan Jawa Barat bertukar pengetahuan, pengalaman, serta berbagi kebutuhan dan juga kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.4.2 Tujuan program Sekoper Cinta

Tujuan dari program SEKOPER CINTA sebagai salah satu solusi dan inovasi baru dalam meminimalisir permasalahan yang dihadapi perempuan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Ciamis terutama dalam hal kesenjangan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan di Jawa Barat. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai upaya mewujudkan perempuan Jawa Barat juara yang mampu memberdayakan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan perempuan dalam program Sekoper

Cinta ialah sebuah upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi dan kontrol serta manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang.

Diharapkan dengan mengikuti program Sekoper Cinta dapat membantu perempuan-perempuan di Jawa Barat akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai hal terkait dengan pemberdayaan perempuan baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupaun ekonomi. Adapaun tujuan dari program Sekoper Cinta ini yaitu:

- 1) Memiliki ilmu pengetahuan dari berbagai kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Memiliki pengetahuan serta mengimplementasikan keterampilan tersebut sesuai dengan hubungan keluarga serta etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kesehatan keluarga.
- 4) Memiliki pengetahuan serta keterampilan tentang penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Memiliki pengetahuan serta mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan mengutarakan pendapat.

2.1.4.3 Sasaran program Sekoper Cinta

Sasaran dari program Sekoper Cinta yaitu 100 orang perempuan dengan usia minimal 18 tahun keatas. Warga belajar dari Program Sekoper Cinta di Kabupaten Ciamis yaitu perempuan-perempuan usia 18 keatas dari desa Wangunjaya kecamatan Cisaga.

2.1.4.4 Tempat dan waktu pelaksanaan program Sekoper Cinta

Program Sekoper Cinta di Kabupaten Ciamis bertempat di Desa Wangunjaya kecamatan Cisaga. Adapun waktu pelaksanaan yaitu selama 3 bulan dari bulan Juli samapi dengan bulan September tahun 2021. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 materi pembelajaran disampaikan secara *online* melalui media elektronik (TVRI Jawa Barat, saluran *Youtube* Sekoper Cinta dan *google*

drive Sekoper Cinta). Dalam proses pembelajaran peserta didik diawali dengan *pre test*, pembelajaran, praktek, diskusi tugas dan materi dan diakhiri dengan *post test*.

2.1.4.5 Modul program Sekoper Cinta

Modul dalam program Sekoper Cinta ada dua yaitu modul dasar dan modul tematik dari program Sekoper cinta. Adapun modul dasar dari program Sekoper Cinta yaitu:

1. Modul Dasar Sekoper Cinta

a. Citra diri perempuan, terdiri dari:

- 1) Pengenalan kodrat laki-laki dan perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Penggalian potensi diri.
- 3) Etika etiket perempuan Jawa Barat.

b. Membangun keluarga bahagia, terdiri dari:

- 1) Pendidikan pra nikah.
- 2) Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
- 3) Komunikasi dalam keluarga.
- 4) Pengasuhan anak dan remaja.

c. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, terdiri dari:

- 1) Pengelolaan air bersih.
- 2) Kesiapan keluarga hadapi bencana.

d. Kesehatan, terdiri dari:

- 1) Pertolongan pertama.
- 2) Pengenalan penyakit, penanganan dan pencegahan.
- 3) Pengenalan jaminan kesehatan nasional.

e. Keterampilan dasar perempuan, terdiri dari:

- 1) Pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga.
- 2) Pemenuhan dan pengelolaan sandang pangan keluarga.
- 3) Perawatan diri keluarga.
- 4) Pemeliharaan rumah pekarangan dan pengelolaan sampah keluarga.

2. Modul Tematik Sekoper Cinta
 - a. Penanganan masalah keluarga, dengan materi:
 - 1) Pengenalan jenis kasus dalam keluarga.
 - 2) Manajemen konflik dan stress.
 - b. Keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, dengan materi:
 - 1) Identifikasi potensi ekonomi di rumah tangga dan lingkungan sekitar.
 - 2) Pengelolaan keuangan usaha rumah tangga.
 - 3) Pengenalan sumber pendanaan.
 - c. Perempuan dan literasi digital, dengan materi:
 - 1) Mengenali internet sebagai sumber informasi.
 - 2) Memilih informasi yang dapat dipercaya.
 - 3) Menggunakan sosial media dengan bijak.
 - d. Keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik, dengan materi:
 - 1) Identifikasi pemimpin dan kepemimpinan perempuan.
 - 2) Peran perempuan dalam pembangunan.

2.1.4.6 Fasilitator program Sekoper Cinta

Dalam program Sekoper Cinta proses pelaksanaannya diikuti oleh fasilitator yang telah mengikuti pelatihan pada bulan Februari tahun 2019 dengan melaksanakan test terlebih dahulu. Adapun narasumbernya berasal dari 19 orang *master of trainer* (MOT) yang merupakan para pakar di bidangnya pada *training of trainer* (TOT) bagi fasilitator dari 672 kecamatan di Jawa Barat. Dibawah daftar nama instansi dari fasilitator yang mengikuti program Sekoper Cinta pada tahun 2021 di Kabupaten Ciamis.

Tabel 2.1 Daftar Fasilitator Program Sekoper Cinta 2021

NO	NAMA	UTUSAN
1.	Hj. Enung Cahyawati., S.Pdi	Dinas P2KBP3A
2.	Drs. H. Syaeful Bakhri., M.Si	Dinas P2KBP3A
3.	Hj. Wati Kuswatini., S.IP., M.Si	P2TP2A Kab. Ciamis
4.	Dra. Erni Mulyaningsih., M.Si	Dinas P2KBP3A
5.	Dra. Hj. Titin Resmiatin	TP PKK Kec. Panjalu
6.	Detin KH Insani	TP PKK Kec. Panjalu
7.	Drs. Roheman., M.Si	UPTD P5A Kec. Cisaga
8.	Kusrini Ania Malik., S.Pd	TP PKK Kec. Ciamis
9.	Ratna Komalasari	PL PEKKA
10.	Susi	TPD Cisaga

2.1.4.7 Peran Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan fasilitator dalam program Sekoper Cinta

Adapun peran Kab/Kota, Desa/Kelurahan dan Fasilitator dalam program SEKOPER CINTA yang dilaksanakan di Jawa barat yaitu:

- 1) Peran Kab/Kota:
 - a) Merumuskan kebijakan implementasi serta mengembangkan program Sekoper Cinta Di Kab/Kota.
 - b) Melaksanakan penilaian dan proses pelaksanaan serta dampak dari program Sekoper Cinta di Kab/Kota.
 - c) Melaksanakan pemanfaatan fasilitas, koordinasi dan konsultasi bagi para fasilitator serta alumni/kader Sekoper Cinta di Kab/Kota.
- 2) Peran Desa/Kelurahan dalam program:
 - a) Menyediakan tempat/lokasi program Sekoper Cinta.
 - b) Merekrut peserta program Sekoper Cinta sesuai dengan keputusan pelaksanaan program.
 - c) Membantu pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program Sekoper Cinta di Kab/Kota.
 - d) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kab/Kota melalui Dinas.

3) Peran Fasilitator

- a) Informator, diharapkan memiliki kredibilitas dan mampu memberikan informasi-informasi tentang Sekoper Cinta serta menyampaikan kembali modul kepada para peserta didik.
- b) Organisator, merupakan pengelola kegiatan pelatihan/pembelajaran program Sekoper Cinta, menyampikan jadwal serta diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta.
- c) Motivator, diharapkan mampu meningkatkan kegairahan dan pengembnagan kegiatan belajar peserta didik.
- d) Pengarah/*director*, diharapkan fasilitator dapat membantu membimbing dan mengarahkan setiap kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan awal bersama.
- e) Inisiator, diwajibkan dapat merumuskan ide-ide kreatif melalui strategi yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik.
- f) Mediator, sebagai penengah dalam kegiatan pembelajaran.
- g) Evaluator, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik.

2.1.4.8 Biaya program Sekoper Cinta

Program Sekoper Cinta adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah Jawa Barat, dalam hal biaya program Sekoper cinta ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dan dibebankan dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Selain program Sekoper Cinta dalam penelitian ini peneliti menambahkan teori yang mendukung dan berhubungan dengan program Sekoper Cinta yaitu teori 10 patokan Pendidikan Masyarakat, dikarenakan program Sekoper Cinta ini merupakan program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk membantu permasalahan perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang serupa, diantaranya:

- 2.2.1 Resiana Nooraeni, Implementasi Program Parenting Dalam Menumbuhkan Perilaku Pengasuhan Positif Orang Tua Di PAUD Tulip Tarogong Kaler Garut. Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Penelitian ini membahas proses pelaksanaan atau implementasi dari program parenting dalam meningkatkan pengasuhan positif orang tua di PAUD Tulip Tarogong Kaler Garut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pelaksanaan program parenting dengan kehadiran orangtua dalam kegiatan *parenting* sehingga mereka selalu mengikuti materi yang disampaikan seperti keterampilan, siraman rohani, memasak, dan lain sebagainya. 2) Sikap orangtua setelah mengikuti program *parenting* menunjukkan perilaku pengasuhan positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 2.2.2 Ikramullah, 2021. Implementasi Program Pencerahan Qolbu Jumat Ibadah Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program pencerahan qalbu jumat ibadah di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menggunakan tiga kesimpulan menunjukkan bahwa (a) program, program jumat ibadah di desa Mandalle sudah baik dikarenakan beberapa aspek yaitu adanya permasalahan yang melatarbelakangi dibuatnya program serta adanya kejelasan anggaran yang digunakan dan adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan program, (b) organisasi pelaksana, yaitu adanya organisasi pelaksana yang jelas mulai dari pemerintah kabupaten hingga ke desa serta kesesuaian antara tugas program dengan organisasi pelaksana hal ini dibuktikan dengan bagusny pelaporan dan pelaksanaan jumat ibadah di desa Mandalle, (c) kelompok sasaran, target atau kelompok sasaran yang jelas dari program jumat ibadah di desa Mandalle sehingga tujuan program

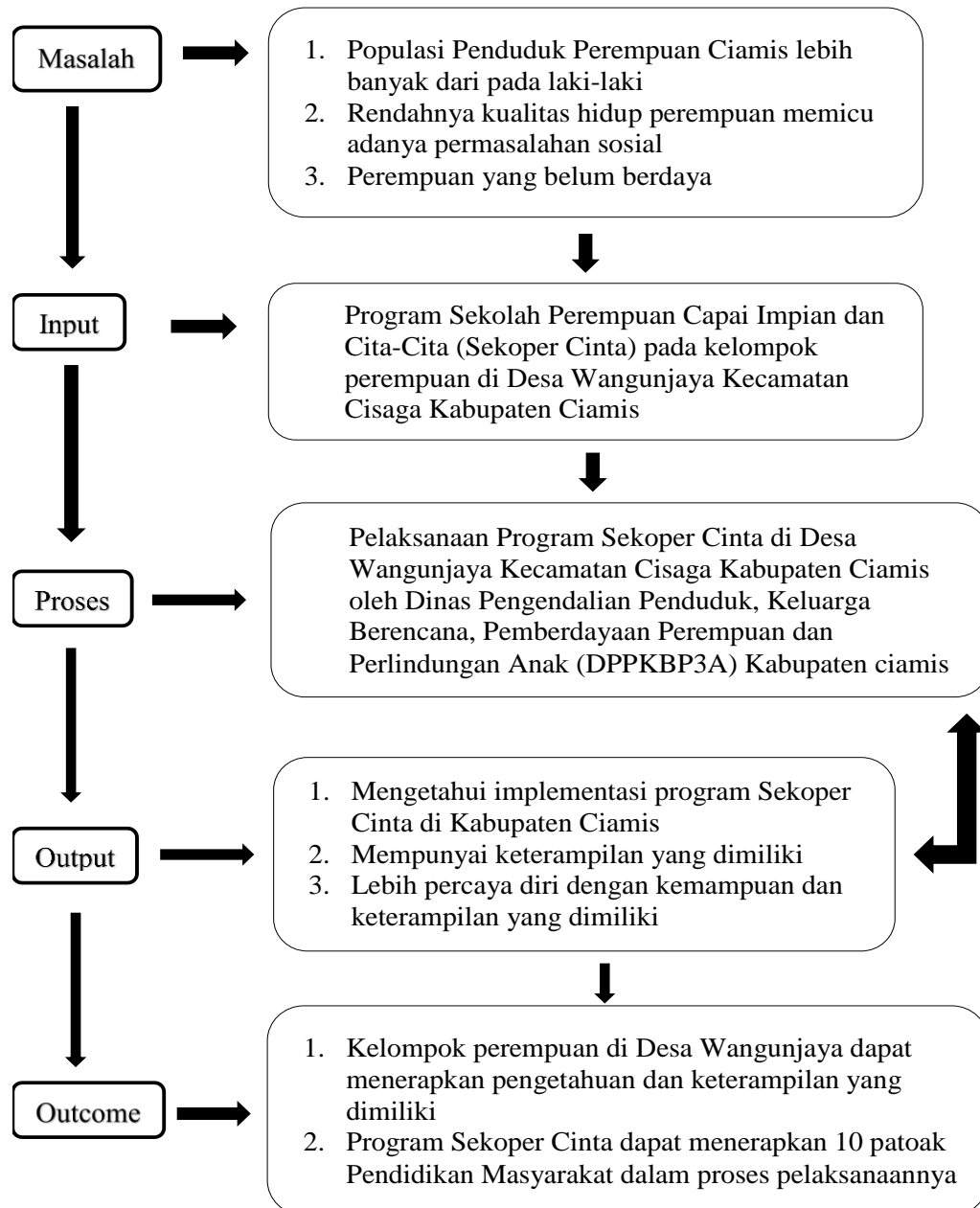
dapat tercapai seperti meningkatnya pelayanan pemerintahan serta kesadaran dalam hal beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

- 2.2.3 Syifa Rachmatillah Cahyati, 2021. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (SEKOPER CINTA) Melalui Program Life Skill Dalam Meningkatkan Kemandirian (Studi pada Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Tasikmalaya). Program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan. Universitas Siliwangi. Penelitian ini membahas bagaimana Sekoper Cinta melalui life skill dalam meningkatkan kemandirian masyarakat RW-16 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian Sekoper Cinta hadir sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan sikap agar perempuan RW-16 Nagarasari mampu meningkatkan kualitas hidup mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan di lingkungannya dalam rangka mencapai keberhasilan serta kemandirian agar masyarakat mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dimasa yang akan datang dengan baik. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.
- 2.2.4 Tirza Fitri Febriyanti, 2020. Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Program SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita) Di Kota Bandung (Studi Deskriptif DP3APM Kota Bandung). Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendidikan karakter melalui program Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita) di kota Bandung. Hasil penelitian ini yaitu: (1) tujuan dan materi yang disusun dalam program Sekoper Cinta dalam meningkatkan pendidikan karakter pada perempuan; (2) proses pelaksanaan program Sekoper Cinta dalam meningkatkan pendidikan karakter pada perempuan;

(3) perkembangan yang dicapai dari pelaksanaan program Sekoper Cinta dalam meningkatkan pendidikan karakter pada perempuan; (4) dampak program Sekoper Cinta dalam meningkatkan pendidikan karakter pada perempuan; (5) kendala dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program program Sekoper Cinta dalam meningkatkan pendidikan karakter pada perempuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

2.2.5 Alfrisa Marselin. Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Program Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita) Di Kota Bandung. Program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian melalui program sekoper cinta (sekolah perempuan capai impian dan cita-cita) di Kota Bandung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih belum adanya evaluasi secara berkala dalam kegiatan program Sekoper Cinta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Program Sekoper Cinta dan melengkapi fasilitas dalam program ini. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan (*Action Research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari **Gambar 1.1** kerangka konseptual peneliti menggambarkan Program Sekoper Cinta merupakan program tahunan Pemerintah Jawa Barat yang di laksanakan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Salah satunya di Kabupaten Ciamis, warga belajar program Sekoper Cinta di kabupaten

Ciamis berasal dari Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga. Yaitu kelompok perempuan yang berada di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga dengan usia minimal 18 tahun keatas. Adapun permasalahan yang memicu terlaksananya program Sekoper Cinta ini :

1. Populasi data perempuan yang lebih banyak dari pada penduduk laki-laki di Kabupaten Ciamis.
2. Persentase kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Ciamis semakin meningkat.
3. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Ciamis.
4. Populasi penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki di Kecamatan Cisaga.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir, maka penulis mengajukan pertanyaan terkait penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana implementasi program Sekoper Cinta pada kelompok perempuan di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis?